

POLA TRANSISI DEMOKRASI YANG TERJADI DI INDONESIA DAN BRASIL

Oleh: Suprisno Baderan
suprisno@gmail.com

Abstrak

Transisi demokrasi dapat di defeniskan sebagai masa peralihan antara sebuah rezim kekuasaan yang sebelumnya ke rezim kekuasaan yang sesudahnya. Transisi demokrasi biasanya menjelaskan bagaimana perubahan politik terjadi pada masa pergantian rezim kekuasaan. Transisi politik pada umumnya terjadi pada masa pemerintahan yang sudah lama berkuasa. Sehingga untuk menuju masa pemerintahan yang selanjutnya dibutuhkan sebuah masa/keadaan untuk beralih dari masa pemerintahan yang telah berlangsung lama sebelumnya. Untuk kasus Indonesia dan Brazi, proses transisi demokrasi yang terjadi pada kedua negara tersebut lebih disebabkan karena adanya faktor pergantian rezim, walaupun tidak dapat diabaikan bahwa ada faktor-faktor yang cukup mendukung, seperti faktor ekonomi, demonstrasi mahasiswa dan lain-lain. Rezim pemerintahan Orde Baru yang sebelumnya bertindak sangat otoriter secara perlahan telah berubah kearah pemerintahan yang lebih demokratis

Keyword : Transisi, demokrasi, Indonesia, Brazil

A. Pendahuluan

Perbincangan tentang demokrasi akhir-akhir ini lebih banyak ditandai oleh kecenderungan lebih optimistik, terutama sejak runtuhnya rezim-rezim sosialis-komunis. Kehancuran rezim-rezim otoriter/totaliter sekaligus dipersepsikan sebagai kemenangan kapitalisme-liberalisme, sebagai induk demokrasi, dengan begitu hilanglah anggapan-anggapan negatif terhadap kapitalisme-liberalisme. Namun demikian, demokrasi tidak akan begitu mudahnya berkembang dengan realitas politik aktual, demokrasi bisa disamakan jika telah tersedia lahan yang memang kondusif bagi pertumbuhannya. Setidaknya tersedia delapan faktor berikut: 1) Keterbukaan sistem politik, 2) Budaya politik partisipatif-

egalitarian, 3) Kepemimpinan politik yang bersemangat kerakyatan, 4) Rakyat yang cerdas/terdidik dan berkepedulian sosial, 5) Partai politik yang tumbuh dari bawah, 6) Penghargaan terhadap formalisme dan hukum, 7) Masyarakat sipil yang tanggap dan bertanggung jawab, 8) Dukungan dari kekuatan asing dan pemilihan golongan mayoritas¹.

Pengertian Transisi

Menurut kamus bahasa latin, *Transisi* berasal dari kata *trans* dan *cendo*. *Trans* sendiri berarti disebelah sana, dibalik, menyebrangi sedangkan *cendo* berarti melangkah kesesuatu yang lain². Dalam kamus umum karangan Jhon M Echols dan Hasan Shadily *transition* juga berarti masa peralihan atau pancaroba. Secara terminologi pengertian transisi adalah suatu masa peralihan kekuasaan dari kekuasaan otoriter ke kekuasaan demokratik atau dari sistem otoriter ke sistem demokratik³.

Transisi demokrasi terjadi pada negara-negara dengan sistem kekuasaan: pertama, monarki absolut dan aristokasi feodal dan kekaisaran negara-negara kontinental. Rezim-rezim yang berkuasa dengan menggunakan sistem ini mengalami transisi menuju demokrasi yang terjadi pada tahun 1828-1926 dan 1922-1942, negara-negara yang termasuk pada kategori pertama adalah Amerika serikat yang terjadi pertama kali pada tahun 1828, kemudian disusul oleh Perancis, Inggris, Italia, dan Argentina sebelum perang dunia pertama.

Kedua, gelombang kedua transisi demokrasi terjadi antara tahun 1943-1962 dan 1950-1975, menghantam negara-negara yang berideologi fasis, negara-negara bekas jajahan rezim kediktatoran pribadi. Ketiga, gelombang transisi menuju demokrasi yang ketiga, terjadi pada negara-negara yang menggunakan pola satu partai, negara yang pemerintahannya didominasi oleh militer dan negara yang dipimpin oleh kediktatoran pribadi. Negara-negara yang masuk dalam kategori ini adalah Yunani, Turki, Pakistan dan lain-lain.

Transisi demokrasi yang terjadi pada setiap negara selalu diawali dengan adanya rezim otoriterisme-birokratik (OB). Menurut O'Donnell rezim OB memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

¹ M. Rusli Karim, Peluang dan hambatan demokrasi, Jurnal Analisis CSIS, penerbit CSIS edisi Januari-Maret 1998 hal. 13

² Gregorius Sahdan, Jalan transisi demokrasi, penerbit produk edukasi yogyakarta tahun 2004 hal. 31

³ Ibid. hal. 32

1. Pemerintah dipegang oleh militer, tidak sebagai diktator pribadi, melainkan sebagai suatu lembaga, berkolaborasi dengan teknokrat sipil
2. Ia didukung oleh entrepreneur oligopolistik, yang bersama negara berkolaborasi dengan masyarakat bisnis Internasional.
3. Pengambilan keputusan dalam rezim OB bersifat birokratik-teknokratik, sebagai lawan dari politik dalam pembuatan kebijaksanaan yang memerlukan suatu proses bargaining yang lama antara kelompok-kelompok kepentingan.
4. Masa di demobilisasikan
5. Untuk mengendalikan oposisi, pemerintah melakukan tindakan-tindakan refresif⁴.

B. Sebab-sebab terjadinya transisi

Pergerakan transisi demokrasi yang terjadi diberbagai negara biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, tergantung situasi dan kondisi negara bersangkutan, akan tetapi Samuel Huntington mengatakan bahwa pergerakan demokrasi yang dilalui oleh negara-negara termasuk dalam kelompok gelombang ketiga disebabkan oleh beberapa faktor;

Pertama, rezim menderita kehilangan legitimasi, itu berawal dari pamor rezim dimata masyarakat yang mulai merosot. Kedua, transisi demokrasi yang paruh terakhir gelombang kedua, dan awal gelombang ketiga bermula dari kegoncangan minyak di beberapa negara. Ketiga, perubahan kebijakan dikalangan gereja katolik di Vatikan yang mempengaruhi pejabat-pejabat gereja di negara-negara lain (terutama kasus-kasus Amerika Latin dan Eropa selatan). Keempat, gemparnya aksi diplomatik Amerika Serikat, untuk mempromosikan demokratisasikan dan hak-hak asasi manusia yang didukung oleh Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE).

Kelima, pengaruh pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di beberapa negara nondemokratik menyebabkan terjadinya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (ekonomi, sosial, budaya). Keenam, transisi ke demokrasi juga dipicu oleh kejatuhan rezim atau rezim mengalami keruntuhan. Runtuhnya rezim otoritarian secara umum disebabkan oleh; a) Kemerosotan basis legitimasi sebagai salah satu unsur penopang rezim, b) Perluasan komunikasi global yang memberi

⁴ Mohtar Mas' oed, Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru (1966-1971) penerbit LP3ES tahun 1989 hal 10

pengaruh yang luar biasa terhadap eksistensi rezim otoriter. Ketujuh, Transisi demokrasi juga disebabkan oleh demonstrasi besar-besaran.

Menurut Huntington, ada lima efek demonstrasi :

- 1) Contagion (penularan)
- 2) Diffusion (penyebaran)
- 3) Emulation (penyamaan atau emulasi)
- 4) Snowballing (penggumpalan/efek bola salju)
- 5) The domino effect (efek domino)

C. Kasus Transisi Demokrasi di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang saat ini mengalami proses transisi demokrasi. Setelah lepas dari pemerintah orde lama dan beralih ke pemerintah orde baru tidak membuat Indonesia menjadi negara yang demokrasi. Pada awalnya rakyat penuh harap dengan pemerintah yang baru (orde baru) agar bisa membawa Bangsa Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis, akan tetapi harapan itu kian memudar tatkala rezim orde baru mulai menunjukkan giginya. Dengan dukungan penuh dari militer rezim orde baru mencoba untuk membungkam hak-hak politik rakyat. Langkah awal yang mereka ambil yaitu dengan menggabungkan partai-partai politik yang ada, dan dari sekian banyak partai digabung menjadi tiga partai yakni pertama, partai persatuan pembangunan (PPP), merupakan gabungan dari partai-partai Islam. Kedua, Golongan Karya (Golkar), merupakan partai pemerintah dan yang ketiga adalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI), merupakan gabungan dari partai-partai nasionalis sekuler. Kemudian dengan membungkam gerakan mahasiswa, yakni dengan membubarkan dewan mahasiswa pada tahun 1978, dan pada tahun itu pula dikeluarkannya kebijakan Badan Koordinasi Kampus/Normalisasi Kehidupan Kampus atau yang lebih dikenal dengan BKK/NKK oleh menteri pendidikan dan kebudayaan.

Depolitisasi gerakan mahasiswa tidak membuat mereka diam, bisa dicatat pada era 1980-an, gerakan mahasiswa lebih berkonsentrasi sebagai kelompok pencari “bahan bacaan” atau “bahan” kajian dan memperkuat basis kelompok studi yang mereka kembangkan, namun demikian, eksistensi kelompok studi makin lama makin “digugat” oleh mereka yang menginginkan aksi riil dilapangan. Mahasiswa lantas melirik pada kecenderungan baru yakni dari diskusi keaksi, karena mahasiswa mulai tertarik melakukan aksi-aksi keluar kampus dan sedikit banyak bersinggungan pada persoalan-persoalan peka-politik. Gerakan

mahasiswa era 1980-an semakin menguat dengan diberlakukannya asas tunggal oleh rezim orde baru.

Pada tahun 1990-an terjadi perubahan yang signifikan bagi gerakan mahasiswa maupun dalam konteks “radikalisasi gerakan” yang, setidaknya mengejutkan berbagai pihak yakni mahasiswa menunjukkan wajah radikalnya. Fenomena radikalisasi mahasiswa 1990-an, setidaknya dapat dijelaskan sebagai berikut; pertama, ditengah struktur politik yang opresif mahasiswa Indonesian dihadapkan pada pilihan-pilihan yang dilematis.

Kedua, gerakan mahasiswa tahun 1990-an telah melangkah pada *counter* hegemoni yang dipaksakan rezim, dengan “hegemoni” pula. Tidak mengherankan kemudian, bila karakter yang menonjol dari militer Orde Baru yang hegemonik itu lantas dilawan dengan “bahasa gerakan” yang tidak membikin takut mahasiswa. Ketiga, mahasiswa tahun 1990-an mampu mendekonstruksi format gerakan yang semula elitis korporatis menjadi gerakan populis. Keempat, penjelasan lain yang sering mengedepan adalah momentum yang tepat bagi seluruh kelompok mahasiswa untuk bersatu visi dalam tema besar “reformasi”. Itulah sedikit penjelasan tentang proses transisi demokrasi dari masa orde baru ke reformasi.

D. Kasus Transisi Demokrasi di Brazil

Brazil adalah salah satu negara yang ketiga dimana terbukti bahwa pemerintah militer tidak semata-mata memperlihatkan masalah kemiliteran, tetapi terutama masalah pembangunan ekonomi. Brazil merupakan negara yang cukup luas dengan jumlah penduduk 115 juta jiwa.

Sebagai negeri yang besar, masalah-masalah politik yang dihadapi Brazil juga sangat besar. Proses politik masa depan akan menentukan siapa yang memerintah, jenis pembangunan apa yang akan terjadi, siapa yang akan memperoleh keuntungan dari pembangunan tersebut, dan apakah arti dari pertumbuhan ekonomi bagi negeri tersebut.

Berbeda dengan pola tradisional intervensi militer di Amerika Latin, kaum militer Brazil telah berkuasa selama dua dasawarsa, dan pergantian presiden secara ajeg telah berlangsung. Hanya jenderal-jenderal yang menjadi presiden, tetapi itupun diatur dengan membatasi jangka waktu berkuasanya dan pemilihan kembali dilarang. Suatu sistem kepartaian yang terkendali ketat telah dikembangkan untuk mengesahkan

kekuasaan pemerintah militer. Umumnya kaum militer berhasil mengendalikan kaum buruh, petani, mahasiswa dan sektor swasta.

Dengan dikuasainya sistem kepartaian oleh militer maka dengan otomatis kekuatan politik dikuasai pula oleh kalangan militer dan didukung oleh para teknokrat. Pada lapisan yang kedua terdapat pengelola perusahaan negara yang jumlahnya semakin banyak. Pada lapisan-lapisan di bawahnya adalah para industrialis dan tuan tanah kaya dalam satu lapisan⁵, dan di bawahnya lagi ada kaum buruh, tani dan penduduk miskin kota. Dalam hal ini gereja Katolik Roma juga merupakan kekuatan politik yang tidak bisa diabaikan dalam proses perpolitikan di Brasil.

Kaum militer memegang peranan penting dan posisi strategis sejak tahun 1964, merekalah yang menentukan arah politik negeri itu. Ini berbeda dengan peranan mereka sebelumnya yang hanya menangani masa transisi diantara pemerintah-pemerintah sipil. Pada dasawarsa 1960-an, kaum militer Brasil menerima pendidikan militer dari Amerika Serikat dalam berbagai segi, terutama dalam penekanan pada pentingnya memelihara keamanan dalam negeri, yaitu ancaman terhadap kepentingan umum yang lebih berasal dari dalam negeri dari pada luar negeri.

Sekali berkuasa, kaum militer membubarkan partai-partai lama, menciptakan partai-partai mereka sendiri, dan untuk menjalankan roda pemerintahan mereka lebih bertumpu pada keahlian para teknokrat, bukan pada politisi partai. Mereka sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah tujuan utama dari rezim mereka. Hal ini sangat menguntungkan para menajer-menajer perusahaan besar, apakah itu multi nasional, nasionalpun yang dimiliki negara.

Akan sejak awal tahun 1980-an negeri ini banyak menimpa musibah, yang menyebabkan namanya agak merosot di dunia Internasional⁶ terutama sekali masalah hutang luar negeri yang pada tahun 1984 mencapai 80 miliar dolar Amerika. Perkembangan yang semakin memburuk pada tahun 1984 ini, membuat pemerintah militer semakin tidak populer, dan pada waktu pemilihan Presiden menyebabkan militer kalah dengan oleh sipil, ini adalah awal muda pemerintah sipil, yang sejak dua dasawarsa negeri itu dipimpin oleh militer.

⁵ Ibid. hal. 127

⁶ Mohtar Mas'ood dan Colin Mac Andrewsm Perbandingan Sistem Politik, Penerbit Gadjah Mada University Press. Cetakan ke 14 2000 hal

E. Persamaan dan Perbedaan Transisi Demokrasi yang terjadi Indonesia dan Brazil

Proses transisi demokrasi yang terjadi pada kedua negara ini, terjadi pada waktu yang berbeda. Transisi demokrasi di Brazil terjadi pada era tahun 1980-an sedangkan transisi demokrasi yang terjadi di Indonesia terjadi pada akhir tahun 1990-an tepat pada pertengahan bulan Mei 1998. Tetapi kalau kita lihat ada kesamaan antara kedua negara ini, yakni kedua-duanya selama kurang waktu tertentu didominasi oleh militer.

Saya akan mencoba membandingkan proses transisi demokrasi yang terjadi pada kedua negara ini dengan menggunakan teori Huntington mengenai penyebab terjadinya transisi demokrasi di beberapa negara termasuk Indonesia dan Brazil.

Pertama, masalah legitimasi, walaupun bukan merupakan faktor tunggal penyebab kehancuran rezim dan membuka jalan untuk demokrasi, tetapi apabila suatu rezim mengalami kemerosotan legitimasi, maka akan kehilangan basis penopang utamanya, hal ini terjadi pada masa pemerintahan orde baru yang pada tahun 1998 kehilangan legitimasi publik, demikian pula yang terjadi di Brazil, ketidak mampuan militer dalam menangani krisis menyebabkan rezimnya tidak terpilih lagi pada tahun 1984.

Kedua, transisi yang terjadi pada waktu itu dipicu oleh harga minyak dunia. Ketidakstabilan harga minyak pada tahun 1970-1980-an menyebabkan kegoncangan ekonomi terjadi pada beberapa negara dunia. Krisis finansial dan ekonomi yang terjadi pada waktu itu menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi mulai melambat. Karena pada waktu terjadi krisis moneter yang berimbas pada perekonomian masyarakat yang semakin ambruk. Di Indonesia terjadi krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998.

Ketiga, transisi disebabkan oleh kebijakan pejabat gereja Katolik Roma. Memang pada waktu itu para pejabat gereja Katolik mendukung proses demokratisasi, hal ini menyebabkan negara-negara yang terdapat perwakilan vatikan mendukung kebijakan tersebut, apalagi Brazil adalah negara yang mayoritas katolik.

Keempat, aksi diplomatik Amerika Serikat, untuk mempromosikan demokratisasi dan HAM, untuk Indonesia dan Brazil terkena imbas dari aksi ini.

Kelima, pengaruh pertumbuhan ekonomi. Hal ini menyebabkan

timbulnya kelas menengah maupun kaum terpelajar di kedua negara tersebut.

Keenam, transisi kedemokrasi juga dipicu oleh kejatuhan rezim. Setelah runtuhnya orde baru maka proses demokratisasi baru bisa dilaksanakan, hal ini dengan ditandai dengan pemilu yang cukup demokratis pada tahun 1999, demikian pula proses demokratisasi di Brazil di mulai dengan terpilihnya presiden dari kalangan sipil pada tahun 1984

Ketujuh, adanya demonstrasi mahasiswa seperti yang dilakukan pada tahun 1998, sehingga menyebabkan lengsernya pemerintahan orde baru.

Untuk lebih sederhana indikator-indikator yang terjadi pada kedua negara berdasarkan teori Huntington dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator	Indonesia	Brazil
1	Kehilangan legitimasi	+	+
2	Krisis ekonomi	+	+
3	Perubahan kebijakan gereja vatican	-	+
4	Isu demokratisasi dan HAM	+	+
5	Pertumbuhan ekonomi	+	+
6	Kejatuhan rezim	+	+
7	Demonstrasi	+	-

F. Kesimpulan

Proses transisi demokrasi yang terjadi pada Indonesia dan Brazil lebih disebabkan karena adanya faktor pergantian rezim, walaupun tidak dapat diabaikan bahwa ada faktor-faktor yang cukup mendukung, seperti faktor ekonomi, demonstrasi mahasiswa dan lain-lain. Transisi demokrasi akan berjalan dengan baik apabila ; pertama, proses demokratisasi ekonomi juga mendukung hal tersebut. Hampir tidak mungkin demokratisasi berjalan dengan baik tanpa *support* dari perekonomian yang baik. Kedua, Penguatan masyarakat sipil guna mendukung dan mengawal proses transisi tersebut juga mesti menjadi fokus. Jika masyarakat sipil telah terbentuk dengan baik, demokratisasi akan mampu berjalan dengan baik.

Ketiga, Proses transisi politik dalam konteks partai politik di Indonesia maupun Brazil mengalami masalah yang serius akibat perilaku aktor yang terlalu dominan dibandingkan sistem yang telah dibuat.

Daftar Pustaka

- Huntington, Samuel P., *Gelombang Demokratisasi Ketiga* edisi terjemahan (Jakarta : Grafiti, 1995)
- Karim, M, Rusli. *Peluang dan Hambatan Demokratisasi*, jurnal analisis CSIS, penerbit CSIS, Jakarta 1998
- Mas' oed, Mohtar, Colin Mc Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta tahun 2000
- Mas' oed, Mohtar, *Ekonomi dan Struktur Pemerintahan Orde Baru*, PT Pustaka LP3ES, Jakarta 1989
- O'Donnel, Guillermo, Philippe C Schmitter, Laurence Whitehead, *Transisi Menuju Demokrasi: kasus Amerika Latin*, PT Pustaka LP3ES, Jakarta 1993
- Sahdan, Gregorius, *Jalan transisi Demokrasi*, penerbit pondok edukasi yogyakarta tahun 2004
- Supriyadi, Budi Winarno, Hubungan Sipil Militer di Brazil Pasca Otoritarian dikutip dari Jurnal Sosiohumanika FISIP UGM, Mei 2002
- Urbaningrum, Anas *Ranjau-ranjau Reformasi*, RajaGrafito tahun 1999